

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Ucap Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, berkat kebaikan dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Penentu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Untuk Itu, pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tulus kepada setiap orang yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah banyak menolong penulis dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menyelesaikan studi maupun tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti. S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (S1), terima kasih karena sudah memberikan begitu banyak pengalaman, pengarahan, dan didikan, serta mengajar kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar.
4. Dr. Jamin Ginting S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami mahasiswa Fakultas Hukum selama kuliah di Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Agus Budianto S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) terima kasih untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang bermanfaat selama menjalani

studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis.

6. Keluarga penulis, Papa Elly Engelbert Lasut, Mama Telly Tjanggulung, Adik-adik tercinta yang sangat penulis kasihi, Terima kasih untuk doa, semangat, motivasi, kepedulian, dan semua dukungannya.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, semua staf dosen yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selamapenulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan .
8. Teman-teman seperjuangan: Bella, Elke, Erik, Franlee, Jeff, Theodora dan juga teman-teman Angkatan 2014 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Penulis bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam tugas akhir ini, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa.

14 November 2017

Hillary Brigitta Lasut

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK dan TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tindak Pidana	20
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.2.2 Contoh Praktek Korupsi.....	23
2.2.3 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli.....	24
2.2.4 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.2.5 Kerugian Negara	35
2.2.5.1 Pengertian Kerugian Negara	35

2.2.5.2 Kerugian Keuangan Negara	35
2.2.5.3 Pohon Kerugian Keuangan Negara.....	38
2.2.5.4 Tahap-Tahap Perhitungan Kerugian Negara....	38
2.2.6 Metode Penghitungan Kerugian Negara	40
2.2.7 Peran BPK dalam Menentukan Kerugian Negara.....	44
2.3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	47
2.3.1 Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan.....	47
2.3.2 Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa keuangan	48
2.3.3 Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh BPK	51
2.3.4 Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara.....	52
2.3.5 Unsur-Unsur Pemeriksaan Keuangan Negara.....	53
2.3.6 Bukti Pemeriksaan.....	55
2.3.7 Laporan Hasil Audit Investigasi BPK.....	57
2.3.8 Kompetensi BPK.....	58
2.4 Laporan Hasil Audit Investigasi Secara Umum.....	58
2.4.1 Prosedur dan Tahapan Audit Investigasi.....	61
2.5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	65
2.6 Komisi Pemberantasan Korupsi.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74
3.1 Metode Penelitian Hukum.....	74
3.2 Macam Penelitian.....	75
3.3 Tipe Penelitian	75
3.4 Jenis Data	76
3.4.1 Bahan Hukum Primer	76

3.4.2	Bahan Hukum Sekunder	76
3.4.3	Bahan Hukum Tersier	77
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.6	Analisis Data	78
3.7	Jenis Pendekatan	77
3.8	Hambatan dan Kesulitan dalam Penelitian.....	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		82
4.1	Penerapan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Kerugian Negara yang menganut Prinsip <i>Actual Loss</i> dalam penghitungan kerugian Negara pada tindak Pidana Korupsi di Indonesia	82
4.2	Penentuan Kerugian Negara Oleh Aparat Penegak Hukum terhadap suatu Tindak Pidana Korupsi harus didasari pada hasil audit investigasi BPK	90
4.3	Rumus Penghitungan <i>Actual Loss</i> Berdasarkan Penelitian dan Analisa penulis sebagai solusi masalah ketidakjelasan teknis realisasi putusan.	100
4.4	Dampak Perubahan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap pasal 4 Undang-Undang ini.....	102
Bab V PENUTUP.....		119
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR GRAFIK dan TABEL

TABEL 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2009 – 2013.....	8
GRAFIK 1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan.....	9
GRAFIK 2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan.....	11



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Permohonan Informasi Publik Resmi dari BPK
- Lampiran 2. Rangkap 2 Formulir Permohonan Informasi Publik BPK
- Lampiran 3. Tanda Terima Surat Permohonan Wawancara dari KPK
- Lampiran 4. Halaman 810 Contoh Penulisan Kerugian Potensial dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penggunaan Anggaran Provinsi Jawa Barat t/a 2016.
- Lampiran 5. Contoh Kerugian Negara didalam Laporan BPK
- Lampiran 6. Contoh Indikasi Kerugian Negara yang Masih dicantumkan dalam Laporan Pemeriksaan BPK yang menjadi salah satu unsur penghitungan *Total Loss*
- Lampiran 7. Penghitungan Total Piutang Tuntutan Ganti Rugi
- Lampiran 8. Contoh Kerugian Negara Potensial dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada prakteknya
- Lampiran 9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016